



ANALISIS KEBIJAKAN IMIGRASI DONALD TRUMP BERDASARKAN KONSEP WELFARE STATE

Dewi Pathul Hayati¹⁾, Gede Indra Pramana²⁾, Tedi Erviantono³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : dewihayati0803@gmail.com¹⁾, indraprama@unud.ac.id²⁾, erviantono2@yahoo.com³⁾

Abstract (English)

Welfare State theory underlines the state's responsibility to ensure a minimum standard of living for all its citizens, a concept first implemented by Germany under Otto Von Bismarck in the 1850s. In the context of President Donald Trump's immigration policies, there are efforts to create prosperity for Native Americans through increasing job opportunities and access to resources. However, the policy is also responsible for the welfare of immigrants living in the country. Unfortunately, Trump's policies are influenced by prejudice and insecurity about foreign threats, with misperceptions about jihad within Islam fueling misguided public opinion and spreading Islamophobia. Some of Trump's close advisers, such as Michael Flynn and Steve Bannon, have issued statements stigmatizing Islam as a radical ideology, exacerbating social issues and creating unconstitutional responses against minorities. Trump acts as a securitization actor, depicting America as insecure and trying to take the migration problem seriously through new policies and strong support from parliament. The slogan "Make America Great Again" reflects Trump's determination to restore America's greatness through strict migration policies.

Article History

Submitted: 2 November 2024

Accepted: 7 November 2024

Published: 8 November 2024

Key Words

Immigration; Policy; Welfare State;

PENDAHULUAN

Imigrasi ke Amerika Serikat, atau perpindahan non-penduduk ke negara ini, telah menjadi faktor utama dalam pertumbuhan populasi dan perubahan budaya di Amerika Serikat sepanjang sejarahnya.

Aspek ekonomi, sosial, dan politik imigrasi sering kali memicu perdebatan mengenai etnisitas, manfaat ekonomi, peluang kerja untuk warga non-imigran, pola pemukiman, dampak terhadap mobilitas sosial, kejahatan, dan hak suara.

Pada tahun 2006, Amerika Serikat menerima lebih banyak imigran legal sebagai penduduk permanen dibandingkan dengan negara lain di dunia. Sejak adanya perubahan kebijakan imigrasi pada tahun 1965, jumlah imigran generasi pertama yang menetap di AS meningkat dari 9,6 juta pada tahun 1970 menjadi 38 juta pada tahun 2007, dan pada tahun 2008, sebanyak

1.046.539 orang memperoleh status kewarganegaraan Amerika Serikat. Negara-negara asal imigran terbesar di AS adalah Meksiko, India, dan Filipina. Meski kehadiran penduduk baru dari berbagai latar belakang budaya menghadapi berbagai tantangan, Presiden Bill Clinton mengungkapkan pada tahun 1998 bahwa "Amerika Serikat selalu diperkuat oleh imigran," menekankan bahwa banyak gelombang imigran telah memberikan kekuatan dan semangat bagi negara ini, menunjukkan ketahanan, penerimaan tantangan, inovasi, dan industrialisasi. Sementara perjalanan udara menjadi lebih terjangkau setelah tahun 1960, migrasi tetap sulit, mahal, dan berisiko, terutama bagi mereka yang mencoba memasuki AS secara ilegal melalui perbatasan dengan Meksiko.

Diskusi mengenai imigrasi di Amerika Serikat seringkali fokus pada peningkatan penegakan hukum terhadap imigran ilegal, pembangunan pagar di sepanjang perbatasan AS-Meksiko yang membentang 2000 mil (3200 km), atau pembentukan program pekerja





tamu yang baru. Pada tahun 2006, banyak proposal terkait ini dibahas secara intensif oleh negara dan Kongres. Pada April 2010, sebagian dari proposal ini menjadi undang-undang, termasuk persetujuan untuk sebagian pagar perbatasan. Namun, tembok yang dijanjikan oleh Donald Trump yang memenangkan pemilihan presiden melawan Hillary Clinton yang juga mencanangkan pembangunan tembok dalam kampanyenya dilaksanakan pada tahun 2016.

Kebijakan imigrasi, khususnya terkait imigrasi ilegal, menjadi fokus utama kampanye Donald Trump. Usulannya dan pandangannya mengenai imigran menarik perhatian media secara luas. Saat ini, diperkirakan ada antara 11 hingga 12 juta imigran ilegal di Amerika Serikat.

Trump sering menggambarkan imigran sebagai penjahat, meskipun beberapa statistik menunjukkan bahwa imigran memiliki tingkat kejahatan dan penahanan yang lebih rendah dibandingkan penduduk asli Amerika. Salah satu janji kampanyenya adalah membangun tembok besar di perbatasan AS-Meksiko.

Trump juga mendukung berbagai pembatasan pada visa imigrasi dan visa tamu, termasuk penundaan pemberian Green Card, dengan tujuan menurunkan tingkat imigrasi ke tingkat yang lebih moderat. Selama kampanye kepresidenannya, proposal mengenai visa H-1B (visa pekerja) mengalami banyak perubahan, tetapi pada akhir Juli 2016, Trump tampak menentang program visa H-1B.

Sebagai presiden, Donald Trump memberlakukan larangan perjalanan dan menanggukuhkan penerbitan visa bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim. Setelah menghadapi tantangan hukum, larangan ini direvisi dua kali, dan versi ketiga disahkan oleh Mahkamah Agung pada Juni 2018 dengan keputusan 5-4. Trump juga menerapkan kebijakan "nol toleransi" terhadap imigran ilegal di perbatasan, yang mengakibatkan pemisahan anak-anak dari orang tua mereka. Kebijakan ini mendapat kritik dari Tim Cook dan 58 CEO perusahaan besar lainnya yang memperingatkan potensi bahaya dari kebijakan tersebut.

Kebijakan imigrasi Trump mencerminkan pendekatan ekonomi nasionalisme. Program "*Put America First*" bertujuan melindungi pekerja dan industri Amerika, dan mengubah arah kebijakan imigrasi AS yang sebelumnya lebih terbuka. Kebijakan Trump berfokus pada enam area utama: membatalkan deportasi bagi imigran yang tiba sebagai anak-anak, membatasi visa dari delapan negara, meningkatkan penyaringan pengungsi sambil mengurangi staf, mendanai pembangunan dinding perbatasan dengan Meksiko, dan meninjau program visa H-1B.

Rencana ini juga mencakup banyak pembatasan pada imigrasi legal. Pada tahun 2017, populasi imigran di AS mencapai 44,5 juta, sekitar 13,7% dari total penduduk, dengan mayoritas berasal dari Asia (41%) dan Amerika Latin (39%).

Kebijakan luar negeri Trump menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga, terutama negara-negara Muslim. Tujuh negara seperti Irak, Iran, Sudan, Suriah, Libya, Somalia, dan Yaman dilarang masuk ke AS karena kekhawatiran bahwa kehadiran Muslim dapat mengancam keamanan nasional. Beberapa kelompok imigran dianggap sebagai potensi anggota ISIS yang mungkin menyusup ke AS sebagai pengungsi.

Kebijakan ini menghadapi penolakan dari masyarakat Muslim dan sebagian besar warga AS, khususnya kelompok konservatif dari Partai Republik. Meskipun banyak kekerasan global tidak berkaitan dengan agama, seperti dalam Perang Dunia I dan II, kebijakan ini dinilai sebagai contoh buruk dari pelanggaran hak asasi manusia oleh AS, yang sering kali dianggap sebagai menjunjung tinggi HAM.

Trump menjanjikan kepada pendukungnya dalam kampanye untuk melarang imigran dari Timur Tengah karena ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Trump menyatakan, "Negara kita tidak boleh menjadi korban serangan mengerikan oleh



orang-orang yang hanya percaya pada Jihad dan tidak menghargai kehidupan manusia.” Namun, kebijakan tersebut menghadapi perlawanan karena dianggap melanggar hak dasar dan kebebasan manusia, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat AS dan komunitas Muslim.

Sayangnya, pandangan keliru yang dimiliki Trump dapat mengarah pada framing negatif terhadap negara-negara Islam dan mempengaruhi opini publik untuk berpikir serupa.

Charlotte Ryan (1991) menjelaskan bahwa analisis framing berfokus pada cara pesan diterima dan dipahami oleh khalayak. Ia menggambarkan analisis framing sebagai alat untuk mengatur informasi tentang bagaimana publik merasakan berbagai isu politik. Misalnya, dengan menggunakan analisis framing, kita dapat memahami ketakutan dan kesedihan yang dialami oleh kelompok atau bangsa tertentu, dan mengonsolidasikan pemahaman mereka tentang sebuah masalah sehingga semua orang memiliki pandangan yang serupa.

Kajian Pustaka

Konsep *Welfare State*

Konsep welfare state merujuk pada ide di mana negara menggunakan sistem pemerintahan demokratis untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Tujuan utamanya adalah mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan. Negara yang menerapkan konsep ini biasanya memiliki kebijakan publik yang mencakup pelayanan, bantuan, perlindungan, atau pencegahan terhadap masalah sosial.

Inggris adalah negara pertama yang mengadopsi ide kesejahteraan sosial dengan menerapkan *Poor Law* antara tahun 1300 dan pertengahan 1800-an. Undang-undang ini diperkenalkan sebagai respons terhadap krisis yang disebabkan oleh perang, yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan kebodohan. Ketika sistem feodal gagal dan tidak ada bantuan tersedia, terutama setelah musibah *Black Death* pada tahun 1349, Raja Edward membuat undang-undang yang fokus pada gelandangan dan pengemis. Pada tahun 1601, Ratu Elizabeth I memperkenalkan *Elizabeth Poor Law*, yang signifikan mempengaruhi kesejahteraan sosial rakyat Inggris.

Selama periode Renaisans dan urbanisasi yang tinggi, pemerintah Inggris mengelompokkan penerima bantuan ke dalam dua kategori: *Worthy Poor* dan *Unworthy Poor*. Kategori *Worthy Poor* mencakup mereka yang tidak mampu bekerja seperti orang tua, buta, cacat, atau anak-anak, dan mereka menerima bantuan berupa penempatan di rumah miskin dan pelayanan dasar. Sebaliknya, *Unworthy Poor* adalah mereka yang miskin karena kemalasan atau perilaku buruk dan dianggap tidak layak menerima bantuan. Mereka diharuskan mencari pekerjaan dan yang menolak bisa dipenjara atau dikirim ke panti untuk bekerja.

Konsep *welfare state* ini kemudian diadopsi oleh Jerman di bawah Otto Von Bismarck pada tahun 1850-an, dengan negara aktif dalam mengelola perekonomian dan menyediakan pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya. Tujuan utama adalah untuk mengatur ulang hubungan antara warga negara dan mengurangi kesenjangan kelas. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan, diperlukan empat syarat: 1) Kewarganegaraan sosial, 2) Demokrasi penuh, 3) Sistem hubungan industri modern, dan 4) Hak atas pendidikan dan perluasan pendidikan massal modern. Negara kesejahteraan juga harus stabil di semua bidang pemerintahan. Namun, pada pertengahan abad ke-20, konsep sosialisme dalam welfare state mulai runtuh setelah pecahnya Uni Soviet.

Hal Ini memunculkan neo-liberalisme sebagai tanggapan terhadap kegagalan dalam membangun kesejahteraan, dengan tujuan mengurangi peran negara dan



mengembalikan urusan publik kepada masyarakat. Dengan demikian, negara harus menyediakan ruang partisipasi publik yang luas agar rakyat dapat aktif dalam urusan publik.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode penelitian berbasis dokumen. Dalam riset ini, studi kepustakaan memainkan peranan penting dengan menyelidiki berbagai karya tertulis, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum (Embun, 2012). Metode dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk tidak turun langsung ke lapangan atau berinteraksi langsung dengan responden untuk memperoleh data. Sebagai gantinya, informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis terhadap sumber teks yang telah ada.

Metode kepustakaan ini mirip dengan metode penelitian lainnya, namun memiliki ciri khas dalam cara pengumpulan data melalui berbagai bacaan dan pengolahan bahan penelitian yang berasal dari sumber teks, termasuk artikel ilmiah dalam literatur terkait. Pendekatan ini menawarkan keunggulan dalam memahami dan menganalisis informasi yang relevan dengan objek penelitian tanpa memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika kita menganalisis situasi ini menggunakan Teori Negara Kesejahteraan, welfare state adalah konsep di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan standar hidup minimum bagi setiap warganya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Jerman di bawah Otto Von Bismarck pada tahun 1850-an dan melibatkan peran aktif negara dalam mengelola dan mengatur ekonomi, termasuk penyediaan layanan kesejahteraan dasar.

Dalam konteks kebijakan imigrasi Trump di Amerika Serikat, kebijakan ini mungkin terlihat sesuai dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi penduduk asli melalui peningkatan peluang kerja dan akses ke sumber daya. Namun, negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi imigran yang tinggal di dalamnya. Sayangnya, kebijakan ini dipengaruhi oleh prasangka subjektif dan ketidakamanan terhadap ancaman dari luar negeri. Kesalahan persepsi Trump tentang jihad dalam ajaran Islam telah memicu opini publik yang salah, dengan anggapan bahwa negara-negara mayoritas Muslim hanya fokus pada jihad dan memerangi non-Muslim secara anarkis.

Menurut laporan dari merdeka.com, beberapa penasihat dekat Trump memiliki pandangan serupa. Penasihat Keamanan Nasional Michael Flynn, misalnya, pernah menyebut Islam sebagai ideologi politik yang menyamar sebagai agama, dan menyamakan Islam dengan kanker ganas. Steve Bannon, penasihat senior Trump dan mantan bos situs berita nasionalis Breitbart, menyebut Islam sebagai agama paling radikal di dunia. Ini menunjukkan bahwa Islamofobia di Amerika dan Barat telah beralih dari isu agama ke isu sosial, di mana kelompok mayoritas merasa terancam oleh minoritas dan merespons dengan tindakan yang tidak konstitusional dan bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka promosikan di negara-negara berkembang.

Akhirnya, Trump berperan sebagai aktor dalam proses sekuritisasi, berusaha menggambarkan Amerika sebagai berada dalam kondisi yang tidak aman dan di luar kendali. Hal ini ditunjukkan oleh kekhawatiran mengenai imigran ilegal yang



dianggap membawa masalah seperti perdagangan narkoba, kejahatan seksual, dan radikalisasi Islam yang dikaitkan dengan terorisme. Dengan pidato-pidato keamanan, Trump mengalihkan isu migrasi menjadi masalah nasional yang perlu ditangani dengan serius. Kebijakan migrasi baru yang diterapkan setelah Trump menjadi presiden

menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu ini, dengan dukungan kuat dari parlemen dan masyarakat selama pemilihan, serta penggantian pejabat yang tidak sejalan dengan agenda Trump. Slogan kampanye “Make America Great Again” mencerminkan tujuan keamanan nasional Trump untuk memulihkan kejayaan Amerika.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari narasi sebelumnya adalah bahwa meskipun teori negara kesejahteraan menekankan tanggung jawab negara untuk memastikan standar hidup minimum bagi semua warganya, kebijakan imigrasi Trump di Amerika Serikat cenderung mengabaikan prinsip ini dengan cara yang terpengaruh oleh prasangka dan ketidakamanan. Kebijakan tersebut, yang terinspirasi oleh pandangan Islamofobia dan ketakutan akan ancaman eksternal, memfokuskan perhatian pada isu-isu seperti imigrasi ilegal dan terorisme, sementara mengabaikan tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan imigran. Trump dan penasihatnya menggunakan retorika keamanan untuk menciptakan narasi tentang ancaman terhadap Amerika, yang mendukung kebijakan-kebijakan migrasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kesejahteraan universal dan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Triwibowo. D. & Bahagijo. S. 2006. “Mimpi Negara Kesejahteraan Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial”.

<https://www.academia.edu/7536259>

[/Mimpi_Negara_Kesejahteraan_Peran_Negara_dalam_Produksi_dan_](#)

[Alokasi_Kesejahteraan_Sosial](#)

<https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-grants-united-states-and-current-economic-crisis/>

<https://www.thebalance.com/donald-trump-immigration-impact-on-economy-4151107>

<https://media.neliti.com/media/publications/228981-kebijakan-presiden-trump-dan-respon-masyarakat-6e0e811a.pdf>

<https://pakarkomunikasi.com/analisis-framing>

<https://www.merdeka.com/dunia/ini-pandangan-donald-trump-dan-anak-buahnya-soal-islam.html>